**IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN DI KOTA BANDUNG**

**Studi Implementasi Kebijakan di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astanaanyar**

Even Amonius Larosa

Even.larosa@yahoo.com

Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanan Program kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi lapangan seperti observasi dan wawancara yang menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar yang didasari pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 [[1]](#footnote-2)tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar. Faktor komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi masih terbentur pada rendahnya sistem komunikasi, kejelasan dalam mentransformasikan kebijakan PIPPK kepada tingkat rw. Sebagai akibat dari tidak berjalnnya transmisi, kejelasan, dan konsistensi berimplikasi pada kekurangpercayaan warga terhadap program yang dijalankan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi bermanfaat. Faktor sumberdaya berkaitan dengan staf dan fasilitas masih terkendala terkait kesediaan dalam peningkatan tenaga ITE dan fasilitas ruangan rapat sebagai sarana penunjang PIPPK. Faktor disposisi berkaitan dengan kejujuran, komitmen salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dikelurahan karanganyar memiliki disposisi yang cukup baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen dengan rencana program yang terlaksana. Faktor sturktur birokrasi berkaitan dengan fragmentasi. Masih belum terlihat efektivitas dan efesiensi khususnya terkait prosedur pengajuan usulan program terhadap warga. Upaya fragmentasi mampu mengakomodir usulan warga melalui mekanisme usulan tidak hanya terpaut unsur

kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggungjawab dan komitmen yang tinggi dalam penerapannya.

**Kata kunci**: Implementasi, Inovasi Pembangunan, Pemberdayaan Kewilayahan

*Abstract*

*The main problem in this study is the implementation of regional development and empowerment innovate (PIPPK) in the karanganyar village of bandung city. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, as for data collection techniques carried out are field studies such as observations and interviews that focus on the study policy implementation about the development innovation and regional empowerment (PIPPK) in Karanganyar, based on regulation of the mayor of bandung Number 436 of 2015 concering change to regulation of the mayor of bandung Number 281 of 2015 concerning the implementation of the regional development and empowerment innovation program (PIPPK) in Karanganyar. Communication system, clarity and consistency are still collided with the low communication system, clarity in transforming PIPPK policy to the level of rw. As a result of the non-functioning of the transmission, clarity and consistency have implications for the lack of trust of citizens towards the program being implemented as a means of information and education is useful. Factor related to staff and facilities are still constrained due to willingness to increase ITE personnel amd meeting room facilities as a means of supporting PIPPK. The disposition factor is related to honesty, commitment is one factor that has important consequences for effective policy implementation. In the Karanganyar area has a pretty good disposition especially at the honesty level and communication to the program plan that is implemented. Bureaucratic structure factor related to fragmentation still have not seen effectiveness and efficiency especially related to procedures for submitting program proposal to citizens. Fragmentation effort are able to accommodate citizens proposals through a proposal mechanism, not only adhered to the technical capacity, but also the element of responsibility and high commitment in its application.*

***Keywords****: Implementation, Development Innovation, Territorial Empowerment*

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Dye, Thomas R.1987. *Understanding Public Policy. Englewood Cliffs*, *N.J Prentice Hall, Inc*

Edward III, George C., 1980. *Implementing Publik Policy. Englewood Cliffts*, New Jersey: Printice Hall Inc

Islamy M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Sodikin, Ikin. 2017, *Kebijakan Pelayanan dan Kepentingan Publik*. Bandung: CV. Kencana Utama

Alamsyah, Kamal. 2016, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Cetak Mandiri Press

N. Dunn, William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta

Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta

Siagian, Sondang P. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, 2001, Alfabeta, Bandung Sutabri.

Syafiie, Inu Kencana Dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Puslit KP2W Unpad,

Van Meter, D.S. and V Horn. 1974. *The Policy Implementation Process* : A Conceptual Framework.” Adminitration And Society. February

Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Yuyun. P dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno Budi, 2004, *Kebijakan Publik teori dan proses*, cetakan kedua, Media Pressindo, Yogyakarta.

Wirman Syafri. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

**Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tentang Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten ataudaerah kota di bawah kecamatan,

Peraturan Mentri dalan Nendagri No 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 [[2]](#footnote-3)tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018

1. Peraturan wali bandung No 436 tahun 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Peraturan wali bandung No 436 tahun 2015 [↑](#footnote-ref-3)